

KINERJA PEMERINTAH DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

Ermalin Widiyana Eka Putri¹, Edhi Siswanto²

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret 2024

Revised Maret 2024

Accepted Maret 2024

Available online Maret 2024

ermalin.w17@gmail.com1,

edhiswanto@unmuhjember.ac.id2

ermalin.w17@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu : (1) Mengetahui kinerja pemerintah dalam penerapan e-government di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember(PAD). (2) Mendeskripsikan dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan e-government kepada masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sumberagung dan pemangku kepentingan terkait di Desa Sumberagung dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam penerapan e-government. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, e-government dapat terus ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat Desa Sumberagung.

Kata kunci: Kinerja, Pemerintah, E-Government

1. Pendahuluan

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *e-government*. Melalui *e-government* pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Adapun dalam program prioritas, *e-government* merupakan salah satu sektor prioritas Pembangunan Pitalebar Indonesia

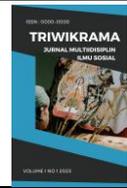


sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. Pada Pasal 7 dicantumkan prioritas pembangunan Pitalebar Indonesia pada lima sektor, seperti *e-Pemerintahan*, *e-Kesehatan*, *e-Pendidikan*, *e-Logistik* dan *e-Pengadaan*. Sehingga terlihat jelas bahwa *e-Government* sudah menjadi hal yang penting untuk diterapkan di berbagai bidang pemerintahan.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Desa Sumberagung adalah Desa yang berada di Kabupaten Jember di wilayah Kecamatan Sumberbaru. Desa Sumberagung terletak di wilayah Kabupaten Jember paling Barat adalah pecahan dari Desa Rowotengah pada tahun 1989, Desa Sumberagung dikenal sebagai Desa Agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat Desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Sumberagung masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Sumberdaya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi: Padi, jagung, kedelai, ubi, kacang panjang, kacang tanah, jeruk, mangga, rambutan, dan tanaman polowijo lainnya.

Banyak masyarakat yang mengeluh karna akses pelayanan publik yang harus datang ke kantor desa dan mengantri. Tidak sedikit masyarakat di Desa Sumberagung ini yang sudah mengenali teknologi informatika. Mungkin dengan adanya penerapan *e-government* ini dianggap mampu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, kalangan bisnis dan industri serta dapat meningkatkan kinerja dari pemerintahan yang masih face to face menjadi lebih terkomputerisasi. Sehingga di harapkan dapat mengurangi pengeluaran biaya-biaya yang tidak di perlukan dan dapat menghemat waktu. Dengan menerapkannya *e-*

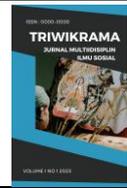


government juga di harapkan bisa mampu memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sumberagung. *E-government* merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, bahwa masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Sementara dalam lingkup lokal Desa Sumberagung, dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain adalah banyaknya masyarakat yang belum mengerti bahwa adanya *e-government* yang dapat mudah dijangkau dan diakses. Meskipun banyak masyarakat yang sudah mengerti teknologi informatika, tapi ada Sebagian masyarakat yang belum mengerti.

Salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan penerapan *e-government*, yaitu faktor sumber daya manusia, dimana sumber daya manusianya harus mengerti dan mampu dibidang teknologi informasi. Bila sumber daya manusia tersebut tidak mampu dibidang teknologi informasi, maka *e-government* di instansi pemerintahan tersebut tidak berjalan optimal. Maka di sinilah peran pemerintah desa sangat penting dalam mensosialisasikan bahwa adanya *e-government* sebagai sarana yang mudah diakses kapan saja. Dalam penerapan *e-government* pemerintah desa tak lepas dari pengaruh peranan pegawai yang ada di pemerintahan tersebut. Sehingga akan terdapat korelasi antara penerapan *e-government* terhadap kinerja pegawai pada pemerintah tersebut. Yang mana dalam hal ini, kinerja pegawai juga merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan *e-government* tersebut.

Karena seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi terutama teknologi informasi, sehingga menciptakan adanya *e-government* yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga dapat pula meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Untuk dapat memulai *e-government*, tentu saja tidak bisa menunggu seluruh masyarakatnya siap. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah telah memulai memikirkan inisiatif pelaksanaan *e-government* dari mulai tahapan yang paling sederhana sekalipun. Karena bagaimanapun penerapan *e-government* akan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

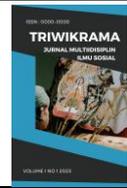
Maka dari itu pemerintah Desa Sumberagung berperan penting dalam menerapkan *e-government* kepada masyarakat. Dan masyarakat Desa Sumberagung di harapkan dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap pelayan publik yang di sediakan *e-government*. Karena dengan begitu pemerintah desa dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan publik yang di sediakan melalui *e-government*.



2. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan referensi oleh peneliti dalam penulisan ini. Penelitian Risa Milah, Yulia Kusuma, Hardianti Inayah (2020), dengan judul “Penerapan E-Government Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) Di Kota Batu” Menurut penelitian ini, aplikasi SIMADE merupakan layanan administrasi di Kantor Kecamatan Kota Batu yang membantu kantor kecamatan Kota Batu menangani statistik kependudukan, termasuk data kelahiran. Dari penelitian tersebut kehadiran aplikasi SIMADE menunjukkan bahwa masyarakat kota Batu sebagai pengguna sangat puas, karena pelayanan administrasi ini sangatlah mudah, masyarakat dapat mengunduh aplikasi SIMADE melalui android atau playstore. Diharapkan aplikasi SIMADE mampu menjadi salah satu wadah alternative baru untuk pemerintah Kota Batu dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakatnya. Penelitian Asep Syaputra (2021), dengan judul “Aplikasi E-Kelurahan untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi dalam Mendukung Penerapan E- Government” Dari penelitian ini bahwa bersamaan dengan pembangunan jaringan online, Pemerintah Kota Pagaralam Sumatera Selatan juga mulai mengembangkan electronic government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas dalam pengambilan keputusan, karena memiliki dukungan dan data yang akurat serta cepat. Aplikasi yang diterapkan salah satunya adalah E-Kelurahan yang pada dasarnya bersifat administrative terhadap pelayanan untuk masyarakat. Kelurahan adalah salah satu lembaga dengan kinerja terendah dalam hal memberikan layanan masyarakat dan menerapkan inisiatif E-Government. Pada semua kegiatan pelayanan administrasi di wilayah tersebut masih manual yang menyebabkan lambatnya pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam membuat surat administrasi. Aplikasi E- Kelurahan ditampilkan berbasis web, tujuan aplikasi ini agar mempermudah data penduduk, data administrasi dan dapat dijadikan media penerapan pembangun desa dengan teknologi informasi dalam mendukung kemajuan daerah tersebut

Selanjutnya penelitian oleh Penelitian Wihda Maulani (2020), dengan judul “Penerapan Electronic Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Program E-Health Di Kota Surabaya” Program E-Health adalah bentuk penerapan E-Government pada pelayanan publik dibidang kesehatan di Kota Surabaya, tujuan pembuatan aplikasi tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan yaitu terjadinya penumpukan volume antrian dan proses rujukan di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya. Aplikasi E- Health juga bagian dari program pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Penelitian dalam aplikasi ini menggunakan indikator E-GovQual yang meliputi Kemudahan Penggunaan (navigasi, personalisasi, efisiensi



teknis), Kepercayaan (Trust), Keandalan (Reability), Isi dan tampilan informasi dan Citizen suport program E-Health

Pengertian Kinerja

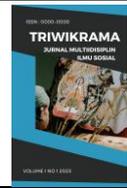
Anwar Prabu Mangkunegara (2006:67) yang menuturkan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mukarom dan Laksana (2012:51) kinerja adalah prestasi kerja atau hasil pelaksanaan kerja. Istilah kinerja berasal dari kata “performance”, sedangkan pengukuran kinerja disebut dengan “performance measurement”. Menurut Sinambela (2016:483) kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan kinerja sebagai kata benda. Keban (2008:209) menyatakan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi.

Widodo (2006:78) menyatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Wibowo (2012:4) kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Keban (2008:210) menyatakan bahwa kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi.

Sinambela (2016:482) menyatakan bahwa kinerja pegawai akan tercipta jika pegawai dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk memperoleh kinerja yang baik, harus diperhatikan tiga elemen pokok berikut ini.

1. Deskripsi jabatan yang akan menguraikan tugas dan tanggung jawab suatu jabatan sehingga pejabat di posisi tersebut tahu secara pasti apa yang harus dilakukannya. Untuk meningkatkan kinerja seorang guru, tentu saja guru tersebut perlu tahu apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya.
2. Bidang hasil dengan indikator kinerja haruslah jelas. Artinya, seorang guru harusnya mengetahui indikator keberhasilan tugas-tugasnya.
3. Standar kinerja untuk menunjukkan berhasil atau tidaknya tugas yang dilaksanakannya.

Dari definisi-definisi diatas kinerja dapat di artikan sebagai sebuah pencapaian seseorang dalam menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawabnya serta tercapainya



tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

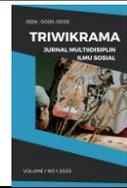
Indikator Penilaian Kinerja

Menurut Robin dalam Mukarom dan Laksana (2016:60) ada tujuh penilaian yang berorientasi pada proses, yaitu:

1. Responsivitas, yaitu menilai daya tanggap pemerintah terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan customer.
2. Responibilitas, yaitu standar yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas, yaitu standar yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan standar eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
4. Keadaptasian, yaitu standar yang menunjukkan daya tanggap pemerintahan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
5. Kelangsungan hidup, yaitu seberapa jauh pemerintah atau program pelayanan dapat menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan daerah atau program lain.
6. Keterbukaan/transparansi yaitu prosedur/tata cara, penyelenggaraan pemerintah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
7. Empati, yaitu perlakuan atau perhatian pemerintah atau terhadap isu- isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat.

Widodo (2006:91) menyatakan bahwa penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai standar menilai keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Terdapat lima kriteria kinerja, yaitu: Widodo (2006:91) menyatakan bahwa penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai standar menilai keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Terdapat lima kriteria kinerja, yaitu:

1. Masukan (input), merupakan sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Keluaran (output), merupakan segala sesuatu berupa produk sebagai hasil langsung pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.



3. Hasil, merupakan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
4. Manfaat (benefit), merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses publik.
5. Dampak (impact), merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lain yang dimulai oleh capaian kinerja setiap kriteria dalam suatu kegiatan.

Selain Widodo ada pendapat dari Pidd, Michael (2012:28) yang menyatakan tiga kriteria dalam menilai kinerja ada tiga, yaitu:

1. Hasil

Pelaksanaan Pekerjaan Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan berharap pelayanan yang disediakan secara efisien. Oleh karena itu untuk menilai kinerja dapat dilihat dari pendekatan mana yang paling efisien dan efektif. Untuk menilai kinerja dapat dilihat dari apa yang sudah berhasil dikerjakan, dengan melihat keberhasilan suatu pelayanan publik dapat diartikan kinerja sudah berjalan dengan baik sesuai sasaran utama atau sebaliknya.

2. Kompetensi

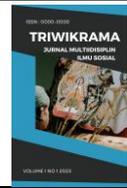
Kompetensi dapat digunakan untuk menilai kinerja karena kompetensi dapat menentukan prestasi yang tinggi dari kinerja tinggi dan memahami mengapa mereka melakukannya dengan sangat baik, sehingga mendorong praktik terbaik. Kompetensi merupakan kewenangan atau kecakapan dan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya.

3. Tanggung jawab

Kinerja dapat dinilai dari keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai bentuk tanggung jawab dalam suatu pekerjaan dapat berupa kejujuran dan kepedulian yang tinggi.

Dari konsep kinerja menurut Widodo dan Michael Pidd di atas, maka peneliti merujuk pada konsep dari Michael Pidd sebagai landasan konsep penelitian, Karena ketiga kriteria di atas mampu mencakup keseluruhan dari kinerja pemerintah desa. Dimana kinerja pemerintah desa di dalam pelayanan administrasi itu mencakup tentang hasil pelaksanaan pekerjaan, kompetensi pemerintah, dan tanggung jawab dari pelaksanaan pekerjaan. Kinerja Perangkat Desa Sumberagung akan dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan konsep kinerja dari Michael Pidd. Kinerja yang akan dianalisis adalah kinerja dari Perangkat Desa Sumberbaru.

E-Government



E-Government merupakan kependekan dari Electronic-Government atau di adaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Pemerintahan Elektronik. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat

Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidaknya-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Fokus penelitian pada penulisan ini adalah melihat dan mendeskripsikan tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Penerapan e-Government. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain data tersebut peneliti juga memperkuat dengan data sekunder berupa penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan langkah awal observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data akan dikumpulkan, dirangkum/direduksi, kemudian data di paparkan dengan pembahasan dan terakhir ditarik kesimpulan.



4. Hasil dan Pembahasan

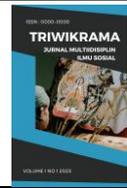
Kinerja Pemerintah Dalam Penerapan E-Government di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Penerapan e-government sekarang masih dibilang belum maksimal dikarenakan dalam hasil penelitian masih ada kekurangan yang ditemui dalam menerapkan e-government ini. Masyarakat Desa Sumberagung masih mendatangi kantor desa dikarenakan website e-government akhir-akhir ini tidak bisa diakses sama sekali.

Hasil wawancara dengan pemerintah Desa Sumberagung kali ini, memang setelah adanya kendala e-government yang tidak bisa diakses, tingkat partisipasi masyarakat untuk mendapatkan layanan masih dibilang besar yang datang langsung ke kantor karena memang masyarakat yang menggunakan e-government belum mendapatkan layanan yang baik saat mengakses website e-government. Oleh karena itu kinerja pemerintah desa dalam kasus ini harus dikembangkan agar e-government dapat segera diakses kembali. Sehingga masyarakat Desa Sumberagung tidak perlu berbondong-bondong untuk datang ke kantor Desa, karena memakan waktu dan biaya sehingga tidak efisien.

Dengan berkaitannya penerapan e-government saat ini, respon masyarakat yang menggunakan e-government masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan website yang sudah ada belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Dari beberapa wawancara yang dilakukan kepada masyarakat masyarakat cenderung mendapati kesulitan saat ingin mengakses berbagai keperluannya dan juga belum meratanya berbagai jenis pelayanan yang disediakan didalam website tersebut. Masyarakat ingin pemerintah segera membenahi website dan menambah layanan yang berbasis e-government, sehingga e-government bisa dimaksimalkan. Agar masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, disamping memudahkan dapat juga meringankan dari segi ekonomis. Lebih jauh lagi, disaat situasi serba online saat ini pelayanan yang berbasis e-government menjadi salah satu alternatif yang efisien.

Pengembangan serta menggunakan layanan e-government hingga saat ini masih memiliki hambatan yang dapat memperlambat dimaksimalkannya e-government tersebut agar dapat digunakan oleh masyarakat khususnya yang berada di Desa Sumberagung. Beberapa hambatan sudah dirasakan masyarakat, akan tetapi ada juga yang menjadi faktor pendukung agar pengembangan e-government ini dapat dimaksimalkan. Di Desa Sumberagung memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, tetapi yang menjadi kendala saat ini yaitu SDM yang masih awam di dalam bidang IT sehingga sebagian masyarakat yang mengakses e-government masih belum merasakan manfaatnya.



Oleh karena itu, dari pemerintah Desa Sumberagung sudah mengambil langkah agar masalah yang dihadapi dapat segera terselesaikan, serta pemerintah masih terus memberikan sosialisasi dalam hal ini kepada masyarakat di Desa Sumberagung agar penggunaan layanan e-government dapat di akses secara luas.

Kerjasama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Sumberagung Dalam Penerapan E-Government Di Desa Sumberagung Kabupaten Jember

1. Partisipasi dalam Penyediaan dan Akses Informasi

Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan akses informasi bervariasi. Sebagian besar responden menunjukkan minat dan keterlibatan yang tinggi dalam mencari informasi terkini tentang kegiatan pemerintah desa, program pembangunan, dan layanan publik melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, situs web pemerintah, dan pertemuan komunitas. Namun, ada juga sebagian kecil masyarakat yang kurang aktif dalam mencari informasi, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau kesadaran yang rendah tentang pentingnya informasi tersebut.

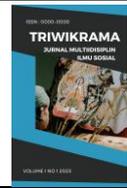
Meskipun terdapat upaya yang signifikan dari pemerintah desa dalam menyediakan informasi, masih ada beberapa tantangan dalam akses informasi bagi sebagian masyarakat. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengakses informasi karena keterbatasan akses internet atau keterampilan teknologi yang terbatas.

Dengan demikian, hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyediaan dan akses informasi di Desa Sumberagung relatif tinggi, dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam akses informasi bagi sebagian masyarakat, yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mengakses informasi serta memastikan inklusivitas dan keamanan informasi bagi semua warga.

1. Partisipasi Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Mayoritas responden menunjukkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait penerapan e-government di desa mereka. Mereka secara aktif terlibat dalam diskusi, forum, dan konsultasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk membahas rencana, kebijakan, dan strategi terkait e-government. Hal ini mencerminkan tingkat keterlibatan yang tinggi dari masyarakat dalam pembangunan teknologi informasi di tingkat lokal.

Mereka menyampaikan kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan mereka terhadap implementasi e-government, yang mempengaruhi arah dan prioritas pengembangan teknologi informasi di desa mereka. Umpan balik ini menjadi dasar



bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan rencana dan kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terdapat kolaborasi yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait e-government. Pemerintah desa menyediakan platform dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan, sementara masyarakat merespons dengan aktif memberikan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan rencana dan program e-government.

demikian, hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait penerapan e-government di Desa Sumberagung didasarkan pada kolaborasi aktif antara pemerintah desa dan masyarakat. Partisipasi ini memungkinkan pengembangan solusi yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memperkuat dukungan serta penerimaan terhadap implementasi e-government di tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam Penyampaian Keluhan dan Masukan

Hasil dari data tersebut juga menggambarkan penerimaan dan tanggapan pemerintah desa terhadap keluhan dan masukan yang diterima dari masyarakat. Mayoritas responden menyatakan bahwa pemerintah desa cenderung menerima keluhan dan masukan dengan baik, dan beberapa di antaranya juga memberikan umpan balik atau solusi atas keluhan yang disampaikan. Namun, ada juga beberapa kasus di mana keluhan atau masukan tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, yang dapat memengaruhi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi lebih lanjut.

Hal ini termasuk perubahan kebijakan atau program pemerintah desa sebagai respons terhadap keluhan yang disampaikan, peningkatan kualitas layanan publik, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan memahami dampak dari partisipasi tersebut, dapat dievaluasi efektivitas dan signifikansi partisipasi masyarakat dalam proses penyampaian keluhan dan masukan.

Melalui pembahasan dan analisis data ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam penyampaian keluhan dan masukan di Desa Sumberagung. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan dalam proses pemerintahan desa.

3. Partisipasi dalam Evaluasi Layanan Publik

Pembahasan dan analisis data tentang partisipasi evaluasi layanan publik di Desa Sumberagung dapat memberikan wawasan yang berharga tentang persepsi, pengalaman, dan harapan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh



pemerintah desa. Warga yang menyatakan persepsi positif terhadap kualitas dan ketersediaan layanan publik di Desa Sumberagung. Mereka merasa puas dengan respons pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat dan merasa bahwa layanan-layanan tersebut memenuhi harapan mereka.

Melalui hasil ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Desa Sumberagung berpartisipasi dalam evaluasi layanan publik dan bagaimana evaluasi tersebut mempengaruhi persepsi dan pengalaman mereka terhadap layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan kepuasan layanan publik di tingkat lokal.

4. Partisipasi dalam Pengawasan dan Pengendalian

Beberapa warga aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan e-government dengan mengikuti pelatihan, menyampaikan masukan, atau secara langsung terlibat dalam mengawasi penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah desa. Mereka menganggap pengawasan sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan integritas sistem.

Meskipun ada kesadaran akan pentingnya pengawasan, terdapat juga tantangan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif. Beberapa warga mungkin menghadapi kendala seperti kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi atau kurangnya aksesibilitas terhadap informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan secara efektif.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian e-government juga dapat memiliki pengaruh terhadap pengembangan dan penyempurnaan sistem. Umpan balik yang diberikan oleh masyarakat dapat membantu pemerintah desa untuk mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam sistem dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.

Melalui hasil ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Desa Sumberagung berpartisipasi dalam pengawasan dan pengendalian e-government, serta bagaimana partisipasi tersebut mempengaruhi persepsi dan pengalaman mereka terhadap sistem e-government yang diterapkan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penggunaan teknologi informasi

Hasil Kinerja Pemerintah Dalam Penerapan E-Government di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

1. Aksesibilitas Layanan Publik

Hasil dari wawancara dengan sejumlah warga Desa Sumberagung menunjukkan bahwa penerapan e-government telah meningkatkan aksesibilitas layanan publik



secara signifikan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka dapat mengakses informasi dan layanan pemerintah desa dengan lebih mudah melalui portal e-government. Mereka mengapresiasi kemudahan mengakses informasi seperti jadwal kegiatan desa, pengumuman penting, dan prosedur administrasi. Beberapa warga juga mengungkapkan bahwa mereka tidak lagi perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk datang ke kantor desa secara langsung, karena hampir semua layanan dapat diakses secara online.

2. Efisiensi Administrasi

Analisis data juga menyoroiti peningkatan efisiensi administrasi setelah adopsi e-government di Desa Sumberagung. Pemerintah desa melaporkan bahwa proses pengolahan permohonan administrasi, seperti surat keterangan dan pendaftaran kependudukan, menjadi lebih cepat dan efisien setelah implementasi e-government. Beberapa petugas pemerintah desa mengungkapkan bahwa mereka dapat menangani lebih banyak permohonan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan produktivitas mereka secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam administrasi juga membantu mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat alur kerja

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun terdapat peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, data kualitatif menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka menghargai upaya pemerintah desa untuk mempublikasikan informasi anggaran dan kegiatan melalui portal e-government. Namun, mereka juga menyoroiti kebutuhan akan informasi yang lebih detail dan mudah dipahami. Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi mereka yang disimpan dalam sistem e-government, menyoroiti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

4. Partisipasi Masyarakat

Dari data ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam penerapan e-government di Desa Sumberagung. Warga secara aktif menggunakan platform e-government untuk memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan mengikuti perkembangan terkini dalam pemerintahan desa. Beberapa warga juga mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan karena dapat secara langsung berinteraksi dengan pemerintah desa melalui platform e-government.

5. Kualitas Layanan Publik

Pendapat warga Desa Sumberagung tentang kualitas layanan publik melalui e-government umumnya positif. Mereka menyatakan bahwa layanan yang disediakan



melalui portal e-government mudah diakses, responsif, dan memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Beberapa warga mengapresiasi kemudahan proses administrasi seperti pengisian formulir secara online dan pendaftaran kegiatan melalui portal e-government. Namun, ada juga beberapa saran untuk perbaikan, seperti meningkatkan responsivitas pemerintah desa terhadap keluhan dan permintaan masyarakat.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari uraian pada bab sebelumnya mengenai “Kinerja Pemerintah Dalam Penerapan E-Government di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa dukungan kuat dari kepemimpinan pemerintah desa, terutama dari kepala desa dan pejabat lainnya, menjadi kunci kesuksesan dalam penerapan e-government. Kepemimpinan yang proaktif dan komitmen yang kuat terhadap inisiatif teknologi informasi memberikan dorongan yang signifikan dalam memajukan proyek e-government.

Rata-rata masyarakat Desa Sumberagung belum sepenuhnya merasakan manfaat dari layanan tersebut karena dalam mengakses website masih menjumpai kekurangan, seperti dalam membuka web terbilang lambat dan sekarang websitenya tidak dapat di akses, sesaat ingin mengurus kebutuhannya informasi seperti apa yang menjadi persyaratan tidak dijumpai dan juga belum banyak bentuk layanan publik yang bisa digunakan. Sehingga kebanyakan masyarakat datang langsung ke kantor agar mendapatkan pelayanan yang ingin dibutuhkan. Tantangan Infrastruktur dan Sumber Daya: Kendala terkait anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam penerapan e-government. Keterbatasan dana dan infrastruktur teknologi yang belum memadai dapat menghambat kemajuan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem e-government. Pendidikan dan Pelatihan Diperlukan: Peningkatan kesadaran dan keterampilan teknis di antara staf pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan adopsi dan penggunaan e-government. Pelatihan dan pendidikan tentang teknologi informasi perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan layanan e-government secara efektif. Sehingga tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan seperti saat ini.

Daftar Referensi

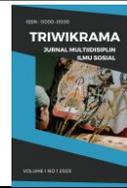
- [1] Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 03, Number 03 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Bungurasih". *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 139-148. 2021.

- [2] Senjani, Y. P. "Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa studi di Desa Kerten, Klaten, Jawa Tengah". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-40. 2019
- [3] "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang". *Jurnal Eksekutif*, 3(3).2020